
Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja dan Jumlah Jenis Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan

Elvina Herawati*, Saipudin

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

*elvinaherawati53@gmail.com

Abstract

This research aimed to determine the effect of Per-capita Income, Total Working Population, and Number of Types of Local Taxes on Local Tax Revenues. This research is a quantitative study, and the analysis technique used is multiple linear regression with the ordinary least squares (OLS) method. The data used in the study were from the Central Statistics Agency of South Kalimantan and the Directorate General of Fiscal Balance 2011 – 2018. The results of the study with the best model FEM show that simultaneously Per-capita Income, Total Working Population, and Number of Types of Local Taxes have a significant effect on Local Tax Revenues.

Keywords: Local Tax, Per-capita Income, Total Working Population, and Number of Types Local Taxes

Abstrak

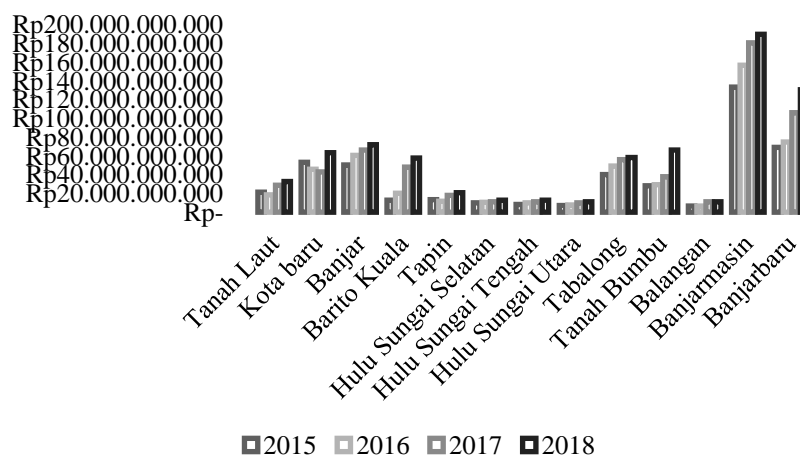
Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Jumlah Jenis Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisa yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2011 – 2018. Hasil dari penelitian dengan model terbaik FEM menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Jumlah Jenis Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja, Jumlah Jenis Pajak Daerah

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) instrumen yang sangat penting dalam menilai kemampuan suatu daerah dalam mengelola daerah tersebut dan merupakan total keseluruhan penerimaan daerah yang berasal dari hasil sumber ekonomi daerah tersebut, dan pajak daerah sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar.

Penyelenggaraan otonomi daerah dapat terlaksana dengan peran serta masyarakat melalui pajak daerah. Sebagai sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga penerimaan pajak daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data pada gambar 1 pajak daerah di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan masih berfluktuasi. Seperti pada kabupaten Tanah Laut, Kota Baru, Tapin, Balangan, dan pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor dari Provinsi Kalimantan Selatan tidak termasuk di dalam Penerimaan Pajak Daerahnya, dikarenakan total penerimaan pajak daerah diambil dari total keseluruhan per jenis pajak yang ada pada daerah masing – masing.



Gambar 1. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, 2015 – 2018

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Penerimaan pajak daerah yang tinggi tentunya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, jumlah penduduk dan pendapatan perkapita dikatakan secara teoritis dapat mempengaruhi penerimaan pajak berdasarkan teori perpajakan Musgrave (1989). Namun pada hasil penelitian (Sari & Ilyas, 2016) dan (Putri, 2013) membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara tidak langsung terhadap penerimaan pajak daerah. Pada penelitian (Haniz, 2013) menyebutkan bahwa jumlah penduduk pada teori perpajakan Musgrave (1989) dapat dibatasi dengan jumlah penduduk bekerja yang diasumsikan sebagai wajib pajak. Dengan tingginya jumlah penduduk bekerja maka wajib atau subyek pajak akan semakin meningkat dan apabila diiringi dengan tingginya pendapatan perkapita seseorang maka kemampuan untuk membayar pajak pun juga semakin meingkat sehingga penerimaan pajak daerah meningkat, artinya kedua variabel ini mempunyai korelasi yang positif terhadap pajak.

Selain pendapatan perkapita dan jumlah penduduk yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah, faktor lain yang juga mempengaruhi adalah jumlah jenis pajak daerah yang dimiliki setiap daerah. Setiap daerah mempunyai potensi dan kemampuan yang berbeda – beda dan berdasarkan tersebut objek pajak setiap daerah pun berbeda, oleh karena itu tidak semua jenis pajak daerah di terapkan oleh kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan. Berdasarkan uraian dan data diatas penulis memutuskan untuk meneliti Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Jumlah Jenis Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

Permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana pengaruh dari Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Selatan ? (2) Bagaimana pengaruh dari Jumlah Penduduk Bekerja terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Selatan ? (3) Bagaimana pengaruh dari Jumlah Jenis Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Selatan ?

Sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Selatan. (2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Jumlah Penuduk Bekerja terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Selatan. (3)

Mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Jumlah Jenis Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Selatan Tahun.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian Haniz (2013) dengan judul penelitian “Faktor – faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal” menunjukkan pertumbuhan ekonomi, wajib pajak, dan pendapatan perkapita Kota Tegal berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal, akan tetapi pengaruh inflasi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal.

Penelitian oleh Putri (2013) dengan judul “Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak” menyatakan pendapatan perkapita dan jumlah surat ijin usaha perdagangan berpengaruh signifikan, sedangkan inflasi berpengaruh signifikan namun secara negatif dan jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak reklame.

Penelitian Sari (2016) dengan judul “Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Bengkulu” menunjukkan hasil Pendapatan perkapita memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, dan Inflasi tidak memiliki pengaruh negative terhadap penerimaan pajak daerah.

METODE

Ruang lingkup penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja dan Jumlah Jenis Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Jenis penelitian dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Sujawerni (2019) Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin di ketahui. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Tempat dan lokasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota dengan total 11 kabupaten dan 2 kota di provinsi Kalimantan Selatan. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data panel gabungan dari data silang tempat (*cross section*) seluruh kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan dan data rentet waktu (*time series*) dari tahun 2011 sampai dengan 2018, dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan sumber data yang di analisis dalam penelitian ini dari Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan (DJPK), Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan catatan atau dokumen yang berkaitan dengan Penerimaan Pajak Daerah, Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Jumlah Jenis Pajak Daerah.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, dalam hal ini semua variabel di transformasikan dalam bentuk logaritma (Log). Data dengan karakteristik panel perlu melakukan penentuan model regresi yang tepat agar tidak terjadi bias dalam penelitian, untuk memilih model yang tepat dalam data panel terdapat berbagai pengujian yang dilakukan meliputi uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier. Pengujian linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos asumsi klasik.

Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji autokorelasi, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan kepada seluruh variabel penelitian, terdiri dari Penerimaan Pajak Daerah sebagai variabel terikat, dan Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Jumlah Jenis Pajak Daerah sebagai variabel bebas untuk mengetahui gambaran deskriptif yang meliputi nilai rata – rata (mean), nilai minimum, dan nilai maksimum data penelitian yang terdapat pada tabel 1

Tabel 1
Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

	Pajak Daerah (Y)	Pendapatan Perkapita (X1)	Jumlah Penduduk Bekerja (X2)	Jumlah Jenis Pajak Daerah (X3)
Mean	33.840.302.621	29.796.804	145.520	9
Maximum	190.036.552.247	70.404.070	309.008	11
Minimum	2.077.254.400	10.196.209	62.192	6
Observation	104	104	104	104

Sumber : Hasil Output Eviews 10 (Data diolah)

Statistik deskriptif pada penerimaan pajak daerah memperlihatkan bahwa nilai rata – rata penerimaan pajak daerah sebesar Rp 33.840.302.621 . Nilai tertinggi Rp 190.036.552.247 yang menunjukkan penerimaan pajak daerah tertinggi pada tahun 2018 di kota Banjarmasin, dan nilai terendah penerimaan pajak daerah sebesar Rp 2.077.254.400 yang terjadi pada tahun 2012 di kabupaten Balangan. Statistik deskriptif variabel pendapatan perkapita memperlihatkan nilai rata – rata pendapatan perkapita adalah sebesar Rp 29.796.804, untuk nilai maksimumnya yang sebesar Rp 70.404.070 terjadi pada tahun 2018 di kabupaten Balangan, dengan nilai minimum Rp 10.196.209 yang menunjukkan pendapatan perkapita pada tahun 2011 di kabupaten Hulu Sungai Utara. Statistik deskriptif pada variabel jumlah penduduk bekerja menunjukkan nilai rata – rata penduduk yang bekerja sebanyak 145.120 jiwa, dengan nilai tertinggi sebesar 309.008 jiwa yang terjadi pada tahun 2018 di kota Banjarmasin, sedangkan nilai minimum sebanyak 62.192 jiwa yang menunjukkan jumlah penduduk bekerja pada tahun 2015 di kabupaten Balangan. Statistik deskriptif jumlah jenis pajak daerah yang ditunjukkan pada tabel 1 menampilkan bahwa nilai rata – rata variabel jumlah jenis pajak daerah sebesar 9, nilai minimum sebesar 6 yang terjadi pada tahun 2012 di Hulu Sungai Utara, dan nilai maksimum sebesar 11 yang terjadi pada beberapa kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Pemilihan Model

Uji Chow

Uji chow yang digunakan untuk menentukan model mana yang dipilih antara *common effect model* atau *fixed effect model*.

Tabel 2
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	26.831511	(12,88)	0.0000
Cross-section Chi-square	160.031768	12	0.0000

Sumber : Hasil Output Eviews 10 (Data diolah)

Hasil uji chow dari tabel 2 menunjukkan F_{hitung} sebesar 26,831511 dan untuk F_{tabel} akan menggunakan rumus yaitu $df1 = k - 1$, dan $df2 = n - k$, sehingga F_{tabel} dari hasil rumus tersebut sebesar 2,70, berdasarkan hasil tersebut F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan model yang dipilih adalah model *fixed effect*.

Uji Hausman

Pada uji chow berdasarkan hasil uji model yang terpilih adalah *fixed effect model* sehingga diperlukan uji hausman untuk menentukan model yang akan dipilih antara *random effect model* dengan *fixed effect model*.

Tabel 3
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.240410	3	0.0041

Sumber : Hasil Output Eviews 10 (Data diolah)

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 3 yang menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0041 yang kurang dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan model yang dipilih adalah *fixed effect*.

Asumsi Klasik

Uji Autokorelasi

Tujuan Uji Autokorelasi adalah untuk menguji dalam model regresi linier ada atau tidaknya terjadi korelasi antara variabel pengganggu pada periode t dengan variabel pengganggu pada periode t-1. Autokorelasi dapat dideteksi dengan statistik Durbin-Watson (DW).

Tabel 4
Hasil Durbin Watson

Variable	Regression
Durbin-Watson stat	1.254094
Durbin-Watson stat after correction	2.147793

Sumber : Hasil Output Eviews 10 (Data diolah)

Statistik Durbin-Watson menunjukkan angka 1,254094 dengan nilai d_L (batas bawah) = 1,6217 dan d_U (batas atas) = 1,7402 sehingga nilai DW terletak antara 0 dan d_L dapat disimpulkan bahwa terjadinya positif autokorelasi, maka perlu dilakukan koreksi. Menurut Ariefianto (2012) koreksi dapat dilakukan menggunakan prosedur iterasi Cochrane-Orcutt, hasil koreksi dapat dilihat pada tabel 4. Dapat dilihat pada tabel diatas, sekarang nilai Durbin-Watson sebesar 2,147793 berada pada daerah penerimaan hipotesis null terletak diantara d_U dan $4 - d_U$ yang artinya tidak terjadinya autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residu atau variabel pengganggu penelitian ini terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk menguji normalitas digunakan Uji Jarque-Bera.

Tabel 5
Hasil Uji Normalits

Variable	Regression	Prob.
Jarque-Bera	2,791493	0,247648

Sumber : Hasil Output Eviews 10 (Data diolah)

Hasil uji normalitas pada tabel menunjukkan bahwa residu atau variabel pengganggu penelitian terdistribusi normal dengan nilai Jarque-Bera sebesar 2,791493 dan nilai probabilitas 0,247648 > 0,05 sehingga menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi uji normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui hubungan atau korelasi yang terjadi antar variabel – variabel bebas dalam persamaan. Menurut Ariefianto (2012) deteksi dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariat pada aplikasi *Eviews* maka diperoleh tabel korelasi bivariat sebagai berikut.

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

	LOGX1	LOGX2	LOGX3
LOGX1	1.000000	-0.277009	0.237147
LOGX2	-0.277009	1.000000	0.212106
LOGX3	0.237147	0.212106	1.000000

Sumber : Hasil Output Eviews 10 (Data diolah)

Dilihat pada tabel menunjukkan bahwa koefisien korelasi bivariat antara variabel – variabel bebas tidak lebih besar dari *rule of thumb* 0,7 dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas

Uji Heterokedastisitas

Perhitungan heterokedastisitas dilakukan dengan Uji Glejser yaitu dengan melakukan regresi variabel terikat sebagai (X) dan nilai residunya sebagai (Y). Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel 7
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Prob.
C	0.1419
LOGX1	0.4128
LOGX2	0.4591
LOGX3	0.4589

Sumber : Hasil Output Eviews 10 (Data diolah)

Pada tabel 7 menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Dengan menggunakan aplikasi *Eviews* maka diperoleh hasil analisis regresi linear berganda dengan model *fixed effect* ditampilkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Konfirmasi pengujian Hipotesis
C	-49.39869	9.327126	-5.296239	0.0000	-
LOGX1	2.979027	0.651523	4.572402	0.0000	Hipotesis Diterima
LOGX2	1.546996	0.827065	1.870465	0.0647	Hipotesis Ditolak
LOGX3	1.835568	0.382135	4.803455	0.0000	Hipotesis Diterima
R-squared					0.928095
Adjusted R-squared					0.915838
F-statistic					75.72226
Prob(F-statistic)					0.000000

Sumber : Hasil Output Eviews 10 (Data diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa metode yang dipilih berdasarkan uji chow dan uji hausman secara statistik relatif baik. Dan didapat persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Log}Y_{it} = -49,39869 + 2,979027 \text{Log}X_{1it} + 1,546996 \text{Log}X_{2it} + 1,835568 \text{Log}X_{3it}$$

Persamaan tersebut, menjelaskan bahwa :

Pertama, Konstanta mempunyai koefisien regresi bertanda negatif sebesar 49,39869 menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk yang Bekerja, dan Jumlah Jenis Pajak Daerah sama dengan 0 (nol) maka Penerimaan Pajak Daerah akan menurun sebesar 49,39869%.

Kedua, Pendapatan Perkapita (X1) mempunyai koefisien regresi bertanda positif sebesar 2,979027 yang berarti apabila terjadi perubahan sebesar 1% pada variabel Pendapatan Perkapita akan meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah sebesar 2,979027% dengan asumsi variabel – variabel lain tetap.

Ketiga, Jumlah Penduduk yang Bekerja (X2) mempunyai koefisien regresi yang juga bertanda positif sebesar 1,546996 yang berarti apabila terjadi perubahan variabel Penduduk yang Bekerja sebesar 1% akan meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah sebesar 1,546996% dengan asumsi variabel – variabel lain tetap.

Keempat, Jumlah Jenis Pajak Daerah (X3) mempunyai koefisien regresi yang bertanda positif sebesar 1,835568 yang berarti apabila terjadi perubahan variabel Jumlah Jenis Pajak Daerah sebesar 1% akan meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah sebesar 1,835568% dengan asumsi variabel – variabel lain tetap.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan proporsi variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas dengan kata lain seberapa baik hubungan yang diestimasi telah mencerminkan pola data yang sebenarnya. Berdasarkan hasil analisis pada tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.928095 atau kalau dipersenkan menjadi 92,81%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel terikat (Penerimaan Pajak Daerah) dapat dijelaskan sebesar 92,81% oleh variabel bebas (Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Jumlah Jenis Pajak daerah), sedangkan sisanya 7,19% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis ada tidaknya pengaruh variabel bebas (Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Jumlah Jenis Pajak Daerah) terhadap variabel terikat (Penerimaan Pajak Daerah) yang secara bersama – sama. Berdasarkan hasil uji-F dapat dilihat pada tabel 8 nilai Prob. F (*Statistic*) sebesar $0,00000 < 0,05$ dengan artian menolak H_0 , sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama – sama variabel bebas (Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Jumlah Jenis Pajak Daerah) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Penerimaan Pajak Daerah).

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas (Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Jumlah Jenis Pajak Daerah) terhadap variabel terikat (Penerimaan Pajak Daerah) secara individual. Berdasarkan hasil pada tabel 8 dengan menggunakan uji t maka disimpulkan Pendapatan Perkapita dan Jumlah Jenis Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah, sedangkan Jumlah Penduduk Bekerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pendapatan perkapita memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,572402 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$). Pengujian ini membuktikan bahwa variabel Pendapatan Perkapita memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila variabel Pendapatan Perkapita meningkat maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah juga. Hasil pengujian ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haniz (2013), Sari (2016) dan Putri (2013) menjelaskan bahwa Pendapatan Perkapita berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tegal dan Provinsi Bengkulu. Hasil analisis regresi berganda variabel Pendapatan Perkapita mempunyai koefisien regresi sebesar 2,979027 bertanda positif yang berarti apabila terjadi perubahan variabel Pendapatan Perkapita sebesar 1% maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah sebesar 2,970927%. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah.

Jumlah Penduduk Bekerja tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah karena t_{hitung} sebesar 1,870465 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,0647 > 0,05$). Pengujian ini membuktikan bahwa Jumlah Penduduk Bekerja tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2013) dan Sari (2016). Hasil regresi linear berganda variabel Jumlah Penduduk Bekerja mempunyai koefisien regresi bertanda positif sebesar 1,546996 tetapi tidak berpengaruh signifikan. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang ada pada penelitian Haniz (2013) dari Musgrave and Musgrave (1989) dan Anwar Ahah (1994) dimana disitu dinyatakan bahwa penerimaan disektor pajak besar kecilnya sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, dan disini dibatasi dengan jumlah penduduk bekerja. Pada nyatanya tidak semua penduduk bekerja di Kalimantan Selatan sebagai wajib pajak daerah yang memiliki kewajiban menyetorkan pajak daerah, dan tidak semua penduduk yang memiliki pekerjaan maupun usaha yang dikenakan pajak daerah. Penduduk bekerja di Kalimantan Selatan yang bukan subjek pajak daerah hanya akan berkontribusi secara tidak langsung dari konsumsi yang mereka lakukan sehari – hari. Sehingga disimpulkan bahwa jumlah penduduk bekerja memiliki peranan tidak langsung dalam membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah di provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, dinyatakan hipotesis penelitian ini ditolak.

Jumlah Jenis Pajak Daerah berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah karena t_{hitung} sebesar 4,803455 dan nilai signifikan $0,0000 < 0,05$. Jumlah Jenis Pajak Daerah merupakan komponen penting dalam Penerimaan Pajak Daerah karena setiap jenis pajak daerah yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan potensi daerah dan penghasil sumber penerimaan pajak. Dari hasil analisis regresi berganda, Jumlah Jenis Pajak Daerah mempunyai koefisien regresi yang bertanda positif sebesar 1,835568 yang berarti apabila terjadi perubahan variabel Jumlah Jenis Pajak Daerah sebesar 1% akan meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah sebesar 1,835568%. Pemerintah daerah tentunya harus mengoptimalkan semaksimal mungkin potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing – masing daerah sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.

PENUTUP

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Perkapita melalui dari sisi PDRB sendiri dengan meningkatkan UMR (Upah Minimum Regional), mengontrol laju inflasi sehingga harga barang tidak mengalami kenaikan dan dapat meningkatkan belanja masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk melakukan investasi atau pembelian surat berharga sehingga mampu memberikan dana untuk pembangunan daerah, dan pemerintah pusat sendiri dapat membantu dengan meningkatkan dana bagi hasil antar setiap daerah sehingga daerah mampu melakukan pengembangan daerahnya melalui belanja daerah. Dari sisi jumlah penduduk pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengontrol laju tingkat kelahiran setiap daerahnya dengan mengoptimalkan program KB (Keluarga Berencana), serta meningkatkan tingkat harapan hidup masyarakatnya. Selain itu pemerintah daerah juga harus mengoptimalkan Jumlah Jenis Pajak Daerah pengoptimalan bisa dilakukan dengan selalu melakukan audit berkas atau data laporan yang diserahkan oleh wajib pajak dan instansi terkait guna menghindari hal – hal yang tidak pantas karena merupakan faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah. Pemerintah Daerah juga diharapkan mampu mengelola Jumlah Penduduk Bekerja karena walaupun tidak memberikan kontribusi langsung terhadap Penerimaan Pajak Daerah, namun pemerintah dapat meningkatkannya dari sisi lain yang bisa mempengaruhi Pendapatan Perkapita.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya mengidentifikasi 3 variabel bebas yaitu Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Jumlah Jenis Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah

di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Rentang waktu yang digunakan hanya selama 8 tahun terhitung dari tahun 2011 – 2018 dikhawatirkan hasil penelitian ini masih kurang mampu menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Jumlah Jenis Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian adalah (1) Uji Simultan (uji F) menunjukkan variabel Pendapatan Pajak Daerah, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Jumlah Jenis Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara bersama – sama terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 – 2018. (2) Uji Parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Perkapita dan Jumlah Jenis Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan variabel Jumlah Penduduk Bekerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 – 2018. (3) Koefisien Determinasi (R^2) dari hasil pengujian diperoleh sebesar 0,928095 yang berarti bahwa 92,81% variabel bebas Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Jumlah Jenis Pajak Daerah dapat menjelaskan variasi variabel terikat Penerimaan Pajak Daerah. Sedangkan sisanya yaitu 7,19% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini. (4) Dari hasil pengujian asumsi klasik diperoleh hasil bahwa variabel bebas (Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Jumlah Jenis Pajak Daerah) tidak terdapat masalah multikolinearitas, masalah heterokedastisitas, dan masalah normalitas. Pada uji autokorelasi hasil awal menunjukkan adanya korelasi, namun setelah dilakukan perbaikan hasil uji autokorelasi menunjukkan tidak terjadi korelasi.

Saran

Pendapatan perkapita terbukti berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan sehingga diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan dapat meningkatkan Pendapatan Perkapita dari sisi PDRB dengan meningkatkan UMR (Upah Minimum Regional), mengontrol laju inflasi, mendorong investasi, dan pemerintah pusat dapat meningkatkan dana bagi hasil. Dari sisi jumlah penduduk dengan mengontrol laju tingkat kelahiran, serta meningkatkan tingkat harapan hidup masyarakatnya. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya pendapatan perkapita maka kemampuan masyarakat untuk membayar pajak daerah juga akan meningkat. Perlunya peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengelola objek pajak daerah yang sudah ada dengan maksimal, dan melakukan pengembangan obyek pajak daerah yang baru yang dapat diterapkan di daerahnya, sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Jumlah Jenis Pajak Daerah juga dapat dioptimalkan dengan selalu melakukan audit berkas atau data laporan karena merupakan faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah. Pemerintah Daerah juga diharapkan mampu mengelola Jumlah Penduduk Bekerja sehingga mampu memberikan kontribusi walaupun secara tidak langsung terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Kepada peneliti selanjutnya agar bisa menambahkan variabel lain yang belum diteliti. Misalnya untuk variabel Jumlah Penduduk Bekerja diganti dengan Jumlah Wajib Pajak atau Jumlah Penyeter Pajak Daerah guna memperkecil cakupan Jumlah Penduduk Bekerja yang memiliki peran langsung terhadap penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

---. (n.d.). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.*

- . (n.d.). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah.*
- . (n.d.). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*
- . (n.d.). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*
- . (n.d.). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO CONVENTION NO.138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT.*
- Aiasih, P. N., Utama, I. S., & Wirathi, I. (2012). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pdrb Per Kapita Terhadap Penerimaan Pkb Dan Bbnkb Serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010. 543 - 563.
- Aini, H. (1993). *PERPAJAKAN*. Jakarta: BUMI AKSARA Jakarta.
- Ariefianto, M. D. (2012). *Ekonometrika esensi dan aplikasi dengan EViews*. Jakarta: Erlangga.
- BPS Kalimantan Selatan. (n.d.). Retrieved from BPS: www.kalsel.bps.go.id
- Dian Triastuti, D. P. (2016). PENGaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/Modal, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2007-2014). *e-Proceeding of Management*, 320-331.
- DJPK. (n.d.). Retrieved from Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>
- Fitriandi, P., Aryanto, Y., & Priyono, A. P. (2011). *Kompilasi Undang - Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haniz, N. F. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tegal. *Diponegoro Journal Of Economics*, 1-13.
- Irawan, & Suparmoko, M. (1998). *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Komarudin, P. (1991). *Uang di Negara Sedang Berkembang*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*. Jogjakarta: Erlangga.
- Mangkoesebroto, G. (1996). *EKONOMI PUBLIK*. Yogyakarta: BPFE - YOGYAKARTA.
- Mankiw, N. G. (2003). *Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Nurrohman, A. (2010). Analisis Faktor - faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta (Tahun 1994 - 2007). *UNS-Fakultas Ekonomi*.
- Parkin, M. (2010). *Macroeconomics*. United States of America: Pearson Education.
- Putri, P. I. (2013). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 194-201.
- Sari, D. P., & Ilyas, F. (2016). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 75-84.
- Schiller, B. R. (2008). *The Macro Economy Today*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Sihan, M. P. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujawerni, V. (2019). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Sukirno, S. (2012). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutrisno. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Semarang).
- UI, L. D. (2010). *Dasar - Dasar Demografi*. Jakarta: Salemba Empat.

Yunimiartiningsih, E. (2018). Pengaruh Jumlah Wisatawan, Pendapatan Per Kapita, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Jawa Timur Tahun 2012 - 2016. *Universitas Islam Indonesia - Fakultas Ekonomi*, 1-21